

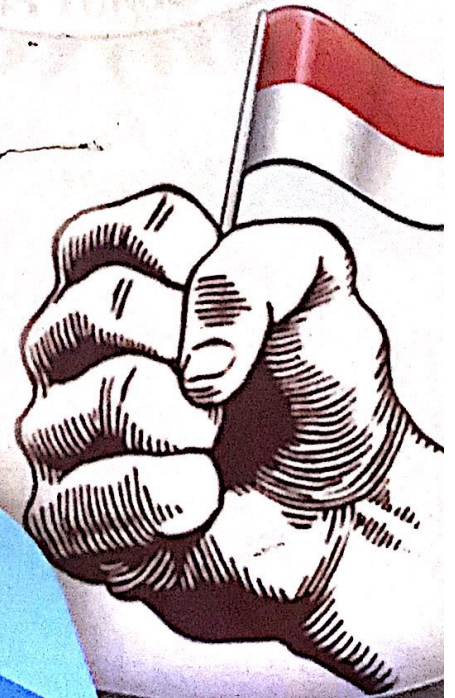
# Negara Khilafah

*versus*

# Negara Kesatuan Republik Indonesia

*Studi Tentang Ideologi dan Gerakan Politik Hizbut  
Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Kebangsaan*

*Dr. Sri Yunanto , M.Si*



**IPS**

Institute For Peace and Security Studies (IPSS)

**Dr. Sri Yunanto , M.Si**

**Negara Khilafah**  
**Versus**  
**Negara Kesatuan**  
**Republik Indonesia**

*Studi Tentang Ideologi dan Gerakan Politik Hizbut  
Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Kebangsaan*

Institute For Peace and Security  
2017

**Dr. Sri Yunanto , M.Si**

**NEGARA KHILAFAH Versus NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA; Studi Tentang Ideologi dan Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Perspektif Kebangsaan,- Jakarta 2017: Institute For Peace and Security; x + 277 halaman 14,8 x 21cm**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidanakan dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PENGANTAR

Pada tanggal 8 Mei 2017 Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jend. (Purn) Dr. H. Wiranto mengumumkan akan membubarkan Ormas HTI. Karena pemerintah menemukan bukti bahwa kegiatan Ormas ini mengusung paham negara Khilafah, menentang demokrasi dan Hak Azasi Manusia. Ideologi dan aktivitas Ormas ini telah nyata mengancam ideologi dan integritas bangsa. Keputusan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan merawat kesatuan dan persatuan.

Sekitar dua bulan kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu poin penting dalam Perppu ini adalah bahwa dalam membubarkan Ormas yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa bisa dilakukan langsung oleh lembaga pemerintah yang menerbitkan pendaftaran dan pengesahan dalam hal ini kementerian Hukum dan HAM untuk Ormas yang berbadan hukum, Kementerian Dalam Negeri untuk Ormas yang terdaftar dan Kementerian Luar Negeri untuk Ormas luar negeri yang mempunyai aktivitas di Indonesia. Pada hari Rabu pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini mencabut status hukum Ormas HTI yang juga sekaligus membubarkan Ormas ini.

Dalam beberapa *statement* pemerintah, melalui Menko Polhukam, meminta masyarakat untuk tenang, berpikir jernih dan menerima Perppu ini. Pemerintah menegaskan bahwa langkah pemerintah tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan,

...

mendiskreditkan Organisasi Masa dan umat Islam. Menko Polhukam Wiranto juga mengatakan bahwa menjaga, merawat negara dan kedaulatan bangsa bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, ras dan etnik. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga dan mempertahankan negara ini dari berbagai ancaman dan gangguan. Itu maknanya bahwa masyarakat Indonesia harus mengetahui berbagai aspek tentang ancaman terhadap bangsa ini, dalam hal ini ancaman terkait dengan ancaman terhadap empat konsensus bangsa Indonesia, yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pengetahuan tentang ancaman dengan baik akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk menangani ancaman tersebut. Kalau pemerintah sekarang ini sudah mengkategorikan HTI sebagai ancaman terhadap empat konsensus bangsa. Artinya masyarakat juga harus mempunyai pengetahuan tentang HTI yang dibubarkan oleh pemerintah. Masyarakat boleh menanyakan apakah benar argumen-argumen yang disampaikan oleh pemerintah.

Buku ini ditulis dalam kerangka pikir tersebut diatas. Oleh karena itu buku ini terdiri dari bagian-bagian atau bab-bab yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam berbagai hal, diantaranya terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Dalam bab awal buku ini membahas sejarah munculnya HT di dunia, tokoh-tokoh utama dan keberadaan atau kiprah HT di beberapa negara termasuk persoalan-persoalan sosial politik sebagai akibat dari gerakan HT yang menyebabkan beberapa negara menolak, melarang atau membubarkan HT. Bab selanjutnya adalah

membahas hadirnya HT di Indonesia yang kemudian menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Langkah pemerintah dalam membubarkan HTI adalah karena ideologi, ajaran dan kegiatan HTI bertentangan dengan empat konsensus bangsa. Masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini mungkin akan bertanya benarkah demikian? Sebagian masyarakat bahkan ada yang berpendapat bahwa ideologi yang diajarkan HTI tidak masalah dengan empat konsensus bangsa. Bab didalam buku ini menyampaikan sebuah analisa yang membuktikan bahwa ideologi HTI bertentangan dengan empat konsensus bangsa. Selain itu buku ini juga mencatat bahwa ideologi tersebut telah disebar luaskan ke seluruh wilayah di tanah air dalam bentuk seminar, halaqoh akbar bahkan kongres khilafah.

HT sering mengklaim bahwa konsep ideologi khilafah merupakan satu-satunya konsep politik dalam Islam. Padahal sesungguhnya Islam tidak mempunyai suatu ajaran sistem politik kenegaraan yang definitif. Artinya umat Islam dipersilahkan untuk merumuskan sistem politik dan sistem kenegaraannya sendiri sesuai dengan konteks, budaya, sejarah yang dialami. Atas dasar tesis ini, rumusan sistem politik khilafah yang diangkat oleh HTI mendapat kritikan dari berbagai pemikir Islam internasional dan nasional. Gerakan HTI dalam mengkampanyekan ajaran khilafah juga mendapatkan penolakan yang luas dari kelompok masyarakat sebgaiannya besarnya muslim yang cinta tanah NKRI. Bab-bab terakhir buku ini menggambarkan tesis dan argumen para tokoh tersebut yang mengkritisi dan membantah persistensi ideologis HTI dan juga deskripsi gerakan masyarakat yang melawan propaganda HTI. Gerakan itu di berbagai tempat sudah mengarah kepada benturan atau konflik. Kondisi ini kemudian menjastifikasi

adanya kepentingan yang memaksa yang mendorong pemerintah untuk menetapkan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Buku ini merupakan hasil riset yang cepat dilakukan oleh tim dibawah koordinasi penulis. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer dalam bentuk wawancara kepada aparat pemerintah terhadap bagian-bagian yang tidak bisa dikumpulkan dalam sumber sekunder dan analisa buku-buku Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara yang menjadi pedoman HTI dan dokumen-dokumen pemerintah terkait dengan langkah penetapan Perppu dan Pembubaran HTI. Kajian ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder dengan mayoritas sumber *online* dalam bentuk video, pemberitaan maupun *website* resmi HTI sendiri.

Penulisan buku walaupun dalam waktu yang singkat buku ini tetap menggunakan kaidah-kaidah akademis, memisahkan antara tesis argumen dan fakta-fakta pendukung dan menghilangkan tuduhan, prasangka, tetapi tetap dalam *frame* kecintaan kami kepada NKRI. Saya mengucapkan terima kasih kepada anggota Tim yang telah bekeja keras melakukan pengumpulan data, mengolah data untuk kemudian saya analisis yang akhirnya menjadi karya ilmiah ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa dan berkontribusi dalam memperjelas isu yang saat ini menjadi kontroversi yang hangat di masyarakat. Buku ini sudah barang tentu sebuah karya yang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu masukan, saran, kritik kami terima dengan senang hati dan dengan tangan yang terbuka.

Jakarta, 20, Juli 2017

**S. Yunanto M.Si Ph.D**

# DAFTAR ISI

Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Daftar Singkatan .....	xi
<b>BAB I : Eksistensi Hizbut Tahrir Sebagai Organisasi Radikal Internasional .....</b>	<b>1</b>
1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir (HT) .....	1
2. Tujuan Hizbut Tahrir .....	6
3. Kebijakan Ekonomi Hizbut Tahrir .....	8
4. Partisipasi Perempuan dalam Hizbut Tahrir .....	8
5. Strategi dan Struktur Perjuangan Global Hizbut Tahrir...	11
6. Tokoh - Tokoh Pendiri Hizbut Tahrir .....	21
7. Perkembangan Global Hizbut Tahrir .....	28
<b>BAB II : Munculnya Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) .....</b>	<b>36</b>
Pendahuluan .....	36
1. Sejarah Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia .....	37
2. Profil Tokoh-Tokoh HTI .....	42
3. Jaringan HTI : Organisasi HTI di Seluruh Indonesia ....	52
4. Gerakan HTI Dalam Menyebarkan Gagasan Pendirian Khilafah Islamiyah .....	56
<b>BAB III: Kontradiksi Ideologi Politik HTI Dengan Ideologi Bangsa...</b>	<b>71</b>
Pendahuluan .....	71
1. Ideologi Politik Hizbut Tahrir .....	74
2. Analisa Kontradiksi Ideologi HTI dengan Konstitusi Negara UUD 1945 .....	78



3. Catatan mengenai negara Bangsa ( <i>Nation-state</i> ) .....	91
<b>BAB IV: Penolakan Terhadap Konsep Negara Khilafah Islamiyah...</b>	<b>98</b>
Pendahuluan .....	98
1. Kritik Para Pakar Islam Internasional Terhadap Sistem Kekhalifahan .....	99
2. Gagal Faham Khilafah: Makmun Rasyid .....	105
3. Penolakan Masyarakat terhadap Kegiatan HTI .....	107
4. Pandangan Tokoh-tokoh Islam Tentang Kebangsaan.....	117
<b>BAB V :Langkah Pemerintah Dalam Pembubaran HTI .....</b>	<b>125</b>
Pendahuluan .....	125
1. Kerangka Hukum Dalam Penanganan HTI .....	143
2. Perbandingan antara UU No 17 /2013 Tentang Organisasi Masa dengan Perppu No UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masa .....	147
3. Reaksi terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas .....	154
<b>Bab VI :Kesimpulan .....</b>	<b>193</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>198</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>205</b>
Lampiran 1 .....	205
Lampiran 2 .....	207
Lampiran 3 .....	210
Lampiran 4 .....	257

# BAB I

## EKSISTENSI HIZBUT TAHRIR SEBAGAI ORGANISASI RADIKAL INTERNASIONAL

### 1. Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir (HT)

Hizbut Tahrir (Arab: التحرير حزب Inggris: Party of Liberation; Indonesia: Partai Pembebasan)/HT atau yang juga disebut dengan Partai Pembebasan Islam atau "*Party Of Liberation*" merupakan kelompok atau gerakan revolusioner Islam yang secara aktif beroperasi di lebih dari 49 negara di seluruh penjuru dunia. Organisasi ini bertujuan untuk mendirikan sebuah negara ekspansionis dan menciptakan sebuah tatanan dunia baru yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup> Alisher Ilkhamov menjelaskan Hizb-ut Tahrir sebagaimana berikut:

*Hizbut Tahrir merupakan sebuah jaringan luas dengan kegiatan missioner dan menerapkan teknik organisasi dakwah terselubung. Kelompok ini pernah muncul sebagai partai politik dan memikat para pengikutnya dengan doktrin politik yang dirancang dengan baik, di mana gambaran strukturalnya mengingatkan pada ideologi Bolshevik dan mesin propaganda.*

*Pertama, gerakan ini dengan terang mendefinisikan citra musuh dan menyodorkan sebuah alternatif yang khas, meski agak utopis, atas keberadaan rezim "jahat" di wilayahnya. Dari posisi kedua landasan yang dilengkapi dengan disiplin hirarki yang ketat, partai ini menghadapi isu sosial yang paling utama saat ini, baik dalam skala lokal maupun global. Dengan respon yang cepat, menjadikan para pengikut Hizbut Tahrir memiliki rasa terlibat*

---

<sup>1</sup> Prinsip – prinsip Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah menerepkan perilaku hidup sebagaimana terkandung dalam Alquran dan Hadits, sesuai dengan Ideologi Islam yang bersumber dari Allah SWT.

## BAB II

### MUNCULNYA HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA (HTI)

#### Pendahuluan

Hizbut Tahrir (HT) lahir sebagai sebuah organisasi politik di Palestina, dengan ideologi kelslaman yang ingin mendirikan sebuah negara yang berasakan Sya'riah Islam. Pemikiran yang didasarkan pada nilai-nilai agama ini dengan cepat berkembang dan mendapat dukungan berbagai masyarakat di berbagai negara, khususnya yang beragama Islam. Pola penyebaran ide-ide Khilafah yang menawarkan solusi berupa pendirian sistem Khilafah ini pada hakikatnya

didukung dengan seruan-seruan politik yang cenderung sama dengan kaum Marxis. Seruan politik ini selalu mengkritik pemerintah yang sah di sebuah negara, dan menunjukkan bukti-bukti kegagalan sistem yang dialami terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal-hal seperti krisis ekonomi, oligarki politik, penguasaan SDA oleh segelintir orang atau investor negara lain, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang menguntungkan segelintir orang, hingga kegagalan sistem politik yang dianggap hasil ciptaan bangsa barat (Eropa, dan Amerika) yang sekuler dan tidak berdasarkan pada nilai kelslaman.

Ide dan pemikiran yang menyentuh kalangan masyarakat menengah ke bawah ini berdampak pada pesebarannya yang luas di berbagai negara. Sehingga kemudian gagasan HT yang ingin mendirikan Kekhilafahan Islamiyah secara global bertransformasi menjadi gerakan Islam transnasional. Meski secara global terdapat organisasi lain yang pengaruh pemikiran dan pengikutnya terdapat di berbagai negara, seperti Ikhwanul Muslimin, Salafi,

## BAB III

# KONTRADIKSI IDEOLOGI POLITIK HTI DENGAN IDEOLOGI BANGSA

### Pendahuluan

Secara umum jika dilihat dari rancangan konstitusinya, Hizbut Tahrir (HT) (di Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia/HTI) merupakan organisasi dakwah yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana organisasi Islam lainnya. Akan tetapi yang membedakan HTI dengan ormas Islam lainnya adalah bahwa organisasi ini memperjuangkan ideologi politik dengan dua pilar utama yaitu; *daulah khilafah Islamiyah* dan anti-demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ideologi dalam tulisan ini dimaknai sebagai sebuah ilmu tentang gagasan, yang sering dikaitkan dengan masa depan. Sehingga Ideologi dapat diartikan sebagai sebuah ilmu tentang masa depan yang merupakan sebuah gambaran utopia, impian, tetapi sekaligus juga merupakan gagasan ilmiah, rasional, yang bertolak dari analisis masa kini. Ideologi menjadi sebuah gagasan yang diikuti dan dianut sekelompok besar manusia atau bangsa, yang nantinya dapat menggerakkan manusia untuk merealisasikan gagasan tersebut.<sup>1</sup>

Bagi sebuah organisasi, ideologi merupakan dasar utama pergerakan guna mencapai tujuan utama organisasi. Marx dan Engels menggunakan "ideologi" untuk menunjukkan konsepsi paling abstrak yang mengisi dunia ide imajiner yang tidak bergantung pada kehidupan material; sedangkan kaum Marxis sering menggunakannya untuk menunjukkan sebuah perspektif

<sup>1</sup> Sarbini, Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 1.

## BAB IV

# PENOLAKAN TERHADAP KONSEP NEGARA KHILAFAH ISLAMIYAH

### Pendahuluan

HTI meyakini bahwa Khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang mencerminkan ajaran Islam yang benar. Keyakinan HTI akan sistem politik Khilafah yang anti demokrasi dan HAM ternyata tidak saja bertentangan dengan 4 konsensus dasar bangsa Indonesia yang mendorong pemerintah untuk membubarkan ormas ini. Ajaran HTI ternyata juga telah mendapatkan penolakan di setidaknya 20 negara yang sebagian merupakan negara Islam sebagaimana akan dibahas dalam bab 4 dan juga mendapatkan penolakan dari masyarakat Islam Indonesia sebagaimana akan dibahas dalam bab 5. Lebih dari itu persistensi HTI dalam memperjuangkan sistem politik khilafah juga mendapatkan kritik dari ilmuwan-ilmuwan Muslim di dunia dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia.

Para Ilmuwan Muslim di dunia itu secara umum menganggap bahwa sistem politik khilafah dicatat sebagai warisan sejarah Islam namun bukan sebagai politik yang baku dalam Islam dan tidak tepat untuk dipaksakan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Sementara ilmuwan Indonesia menganggap bahwa sistem negara pluralis saat ini lebih tepat sebagai rumah bernegara umat Islam Indonesia yang ditakdirkan hidup dalam keragaman dan kebhinekaan. Bab ini akan membahas pendapat, pandangan, kritik ilmuwan internasional dan nasional terhadap sistem politik khilafah, demokrasi dan NKRI.

## BAB V

# LANGKAH PEMERINTAH DALAM PEMBUBARAN HTI

### Pendahuluan

Sebagai mana dibahas sebelumnya HT masuk di Indonesia sejak tahun 1980-an atau masa Orde Baru. Ormas ini menjalankan kegiatan secara bertahap, bahkan mendapatkan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014 yaitu pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil Presiden Budiono dengan nomer No AHU 00282.60.10.2014. Kita belum melakukan kajian secara mendalam mengapa pemerintah pada saat itu meloloskan pengesahan HTI. Kabar yang beredar adalah bahwa pemerintah teledor memberikan izin kepada Ormas yang Rancangan Undang Undang Dasarnya (RUUD), ideologi yang tertulis dalam ajarannya dan kegiatan juga nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika atau terjadinya penyusupan elemen-elemen yang akan mengganti ideologi bangsa baik di Parlemen dan di eksekutif. Kajian yang lebih mendalam memang perlu dilakukan soal ini.

Mengapa inisiatif pembubaran HTI terjadi pada masa Jokowi- JK? Sikap pemerintah Jokowi ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. NawaCita Presiden Jokowi nomor 2, 8 dan 9 sangat jelas menyebutkan komitmen pemerintahan Jokowi –JK untuk mengembangkan demokrasi, nasionalisme dan kebhinekaan, konstitusi dan Pancasila.

### Nawa Cita Nomor 2

*Menghilangkan absennya pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya*

## BAB VI

### KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan cabang dari Hizbut Tahrir (HT) Internasional yang muncul pertama kali di Libanon. Konteks politik dari kemunculan HT ini sebenarnya merupakan perlawanan terhadap ekspansi Israel di Palestina. Namun berbeda dengan negara-negara Islam lainnya yang juga melawan Israel, HT mensyaratkan pembentukan sebuah sistem politik Pan Islamiyah dalam institusi Daulah Khilafah Islamiyah untuk melawan Israel. Itu artinya menghancurkan keragaman sistem politik dengan basis negara bangsa (*Nation State*) di negara-negara Islam yang sudah nyaman dengan keragaman sistem politik sendiri dalam bentuk republik dengan berbagai karakteristiknya seperti pluralis majemuk (NKRI), Islam (Pakistan), Keimaman (Iran), Sekuler (Turki), kerajaan (Timur Tengah, Malaysia, Brunei dan lain-lainnya). Maka tidak heran kalau HT mendapatkan penolakan, pembubaran dan pelarangan di negara-negara tersebut dan negara lain di dunia.

Ideologi HT itu telah merasuki sebagian dari anak bangsa Indonesia yang kemudian membentuk Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka mulai melakukan kegiatan Ormasnya pada tahun 1980-an. Kelompok yang berkembang utamanya di kampus kampus di Indonesia ini kemudian melakukan perekrutan dan mengembangkan ajaran di 300-an kabupaten dan hampir di 30 wilayah propinsi di Indonesia dengan masa aktif hingga ratusan ribu, bahkan ada versi yang menyebutkan jutaan. Pada tahun 2014 HTI ini justru mendapatkan status formalnya sebagai Ormas yang terdaftar di kementerian Hukum dan HAM. Dengan *frame* HT internasional itu, HTI menyebarkan ideologi anti Pancasila dalam berbagai aktivitas gerakannya. Setelah diteliti dengan lebih

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Akbarzadeh, Shahram dan Fethi Mansouri (ed.), *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West* (London and New York: Tauris Academic Studies, 2007)
- Al-Jawi, Muhammad Shiddiq. *Malapetaka Akibat Hancurnya Khilafah*. Bogor: Al Azhar Press, 2004
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Daulah Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia-Press, 2012
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *The Islamic State*. London: Al-Khilafah Publications, 1998
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Kepribadian Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia – Press, 2011
- Zada, Khamami dan Arif R. Arafah. *Diskursus Politik Islam*. Jakarta: LSIP, 2013
- Farouki, Suha Taji. *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*. London: Grey Seal, 1996
- Feith, Herbert & Lance Castles. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta:LP3ES, 1995
- Hizb ut-Tahrir. *Hizb ut-Tahrir*. London: Al-Khilafah Publications, 2000
- Hizb ut-Tahrir. *The Institutions of State in the Khilafah: in Ruling and Administration*. London: Hizb ut-Tahrir, 2005
- Hizb ut-Tahrir. *The Ummah's Charter (Meethaq ul-Ummah)*. London: Khilafah Publications, 1989
- Karagiannis, Emmanuel. *Political Islam in Central Asia: The Challenge of Hizb ut-Tahrir*. New York: Routledge, 2010
- Mahmassani, Maher S. *Islam in Retrospect: Recovering the Message*. Massachusetts: Olive Branch Press, 2014



Martin, John Levi. *What Is Ideology*. Chicago: University of Chicago, 2015

Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Rasyid, Makmun. *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Paham Khilafah*. Jakarta: Pustaka Compass, 2016

Sarbini. *Islam di tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005

Tim Hizbut Tahrir. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Thariqul Izzah, 2007

Turmudzi, Endang dan Riza Sihabudin (ed.). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2006

#### **Jurnal**

Abshar, Ulil. "Kritik atas Argumen Aktivis Hizbut Tahrir". *Democracy Project Edisi 051* (Maret 2012).

Ahmed, Houriya & Hannah Stuart, " Hizb Ut-Tahrir : Ideology And Strategy". *The Center of Social Cohesion* (2009)

Aislahi, Abdul Azim. "Stages of socio-economic development: Shah Wali-Allah's concept of al-irtifaqat". *Journal of Objective Studies* 1-2.(1989)

Ali, Ahmad. "Kritik atas Jargonisasi Khilafah dalam Konteks Indonesia". *Innovatio*, vol. XI no.1. (Januari, 2012)

Baran, Zeyno. "Hizb Ut-Tahrir : Islam's Political Insurgency". *The Nixon Center* (Desember, 2004)

Bunzel, Cole. "From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State". *The Brooking Projects* (Maret, 2015)

Gondal, Ishtiaq Ahmad. "Bediuzzaman Said Nursi's Methodology for the Revival of Muslim Society with Reference to his Damascus Sermon". *Al-Adwa* 41:29. (2014)

- Haqqani, Hussain. "Understanding HT Ideology". *The Challenge of Hizb ut-Tahrir*. (September, 2004)
- Moussalli, Ahmad. "Human Rights". *International Journal on World Peace*, Vol. 18, No. 4 (Desember 2001)
- Muhsin, Ilyya. "Gerakan penegakan syariah: studi gerakan sosial Hizbut Tahrir Indonesia di DIY". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2012)
- Mulia, Muji. "Sejarah Sosial dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq". *Jurnal Ilmiah Islam Futura vol X no 2* (Februari, 2011).
- Rauert, Tyler. "The Next Threat from Central Asia". *Journal of International Security Affairs* 9 (2005)
- Seise, Claudia. "Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia: An Introduction to its Thoughts and Activities". *Südostasien Working Papers No. 44 Berlin* (2011)
- Shobron, Sudarno. "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia". *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (Juni, 2014)
- "Central Asia: Islamists in Prison,". *International Crisis Group Asia Briefing no. 97*, (Maret, 2009)
- "Hizb ut-Tahrir", *Jane's Terrorism and Insurgency Center* (October, 2009)
- Adam, Fadzli. "Polemics of the Islamic Caliphate". *Mediterranean Journal of Social Sciences MC SER Publishing, Roma*, vo. 6 no 4 S2 (Juli, 2015)
- "Radical Islam in Central Asia". *International Crisis Group* (Juni, 2003)

### **Makalah, Skripsi, Tesis dan publikasi penelitian**

- Abdullah, Kurniawan. *Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer. Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia. 2003.

Agus, Salim. *The Rise of Hizbut Tahrir Indonesia*. Jakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2005

Effendy, Muhadjir. *Visi dan Strategi Pendidikan Kebangsaan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Bandar Lampung: Makalah Tanwir Muhammadiyah 2009 Hanafi, Adnan Nur. *Pemikiran Dakwah Dalam Merubah Perilaku Asusila Menurut H. Muhammad Ismail Yusanto*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2014

Paz, Reuven. *The University of Global Jihadin The Challenge of Hizb ut-Tahrir*. September 2004

Saiful Mujani Research & Consulting. *NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional*. Jakarta: 2017

Siddiqui. *Doctrine of Hizb ut-Tahrir*. September, 2004

Yusrianto, *Pemikiran Politik dan Perjuangan KH. M. Hasyim Asy'ari Melawan Kolonialisme*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2014

Zamzami, Achmad Nuril. *Pemikiran dan Aktivitas Politik KH Hasyim Asyari pada masa Perjuangan Merebut dan Memepertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1926-1947*, Jember. Skripsi Universitas Jember. 2011

#### Majalah

Abdurrahman, Hafidz. "Hizbut Tahrir Masuk Parlemen Mengapa Tidak?". Hidayatullah, Surabaya: April 2005

Abdurrahman, Yahya. "Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani". *al-Wa'ie*. Maret 2005

Malik, Shiv. "For Allah and the Caliphate". *New Statesman* 17, no. 824. 2004

## **Acara Televisi, Seminar dan Forum**

*Din Syamsuddin. Aiman, Kompas TV 12 Juni 2017*

*Haedar Nashir. Rubrik opini, Koran Kompas 26 Mei 2017*

*Igor Rotar. Central Asia: Hizb-Ut-Tahrir Wants Worldwide Sharia Law, Forum 18 pada 29 Oktober 2003*

*Rofik Al Amin. Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia, Diskusi buku pada 30 Mei 2017 di Meeting Room D Hotel, Jakarta Selatan.*

## **Situs Internet**

<http://adiwidayat.blogspot.co.id/>

<http://www.eastwestrecord.com>

<http://harimoekti.com/profil-hari-moekti/>

<https://hizbut-tahrir.or.id>

<http://home.uchicago.edu>

<http://indowarta.com/>

<https://insists.id/>

<http://jabar.metrotvnews.com/>

<https://kumparan.com/>

<http://m.jpnn.com>

<https://m.tempco.co>

<http://megapolitan.kompas.com/>

<http://nasional.kompas.com>

<http://nasional.news.viva.co.id/>

<http://news.bbc.co.uk/>

<https://news.detik.com>

<http://news.liputan6.com/>

<http://news.metrotvnews.com/>  
<http://sumpahpemuda.org/>  
<http://triknews.net/>  
<http://www.academia.edu>  
<http://www.bbc.co.uk>  
<http://www.bbc.com>  
<http://www.cnnindonesia.com>  
<http://www.hizb-ut-tahrir.org>  
<http://www.infid.org>  
<http://www.Islamic-state.org>  
<https://www.kapanlagi.com>  
<http://www.mpacuk.org>  
<http://www.muslimnews.co.uk>  
<http://www.muslimoderat.net>  
<http://www.nu.or.id>  
<http://www.religioscope.com>  
<http://www.republika.co.id>  
<http://staff.ui.ac.id>  
<http://www.thisisderbyshire.co.uk/>  
<http://www.tribunnews.com>  
<https://www.voaindonesia.com>  
<http://www.yale.edu>

**Perundangan**

Undang-Undang Dasar 1945

## **Video**

*Berbagai Video Kegiatan HTI (di lampiran)*

## **Lampiran**

*Cover Buku-buku HTI*

*Cover Video Kegiatan HTI*

*UU 17 Tahun 2003 tentang Ormas*

*Perppu no 2 Tahun 2017 tentang Ormas*

**M**asyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dari berbagai latar belakang suku, agama ras dan etnis. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga dan mempertahankan negara ini dari berbagai ancaman dan gangguan. Artinya bahwa masyarakat Indonesia harus mengetahui berbagai aspek tentang ancaman terhadap bangsa ini, dalam hal ini terkait dengan ancaman terhadap empat konsensus bangsa Indonesia, Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI. Pengetahuan tentang ancaman dengan baik akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi untuk menangani ancaman tersebut. Kalau pemerintah sekarang ini sudah mengkategorikan HTI sebagai ancaman terhadap empat konsensus bangsa. Artinya masyarakat juga harus mempunyai pengetahuan tentang HTI yang dibubarkan oleh pemerintah. Masyarakat boleh menanyakan apakah benar argumen-argumen yang disampaikan oleh pemerintah.

Buku ini ditulis dalam kerangka pikir tersebut diatas. Oleh karena itu buku ini terdiri dari bagian-bagian atau bab-bab yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam berbagai hal, diantaranya terkait dengan Hizbut Tahrir Indonesia.